

DESKRIPSI INOVASI UNTUK HAKI

Penelitian: PELUANG DAN TANTANGAN KONVERSI BANK NAGARI MENJADI BANK UMUM SYARIAH: Perspektif Politik, Ekonomi, Ideologi Dan Budaya

Satu-satunya bank milik Pemerintah Daerah Sumatera Barat adalah Bank Nagari, yang selama ini memakai dual banking system: Konvensional dan Unit Usaha Syariah.

Semenjak 2019 telah berwacana untuk menentukan sikap pemegang saham bahwa Unit Usaha Syariahnya akan berbentuk *spin off* atau Bank Nagari itu akan konversi menjadi Bank Umum Syariah.

Hasil temuan, ternyata terjadi tarik menarik di antara pemegang saham, Pimpinan Daerah Provinsi Sumatera Barat dan para Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota yang ada, yakni ada yang setuju untuk dijadikan konversi, namun hamper separoh di antara mereka menginginkannya hanya dalam bentuk *spin off*.

Bagi pemegang saham yang setuju dengan konversi lebih didasari kepada motif ideologi keagamaan dan budaya Minangkabau yang berbasis Syariah Islam yang dianut oleh mayoritas penduduk Sumatera Barat. Karena system konvensional itu adalah Riba dan diharamkan dalam Islam.

Akan tetapi yang menginginkan *spin off*, dan tetap mempertahankan keberadaan bank tersebut berbentuk konvensional, ternyata di dasari kepada motif politik praktis, yakni sangat merasa khawatir akan meningkatkan popularitas personal Gubernur yang berasal dari Partai tertentu, dan tentunya akan merugikan kepada Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota yang tidak separtai atau tidak dalam koalisi partai, dan itu menurunkan peluang mereka untuk Kembali menjabat pasca Pemilu 2024. Di samping itu, konversi akan membuat terjadinya penurunan deviden daerah yang selama ini telah menjadi andalan bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di daerah mereka masing-masing. Sehingga juga akan mengganggu reputasi mereka saat mereka memimpin daerah.

Kesimpulannya, pro dan kontra dalam kebijakan konversi Bank Nagari menjadi Bank Umum Syariah, telah membuat terjadinya tarik menarik antara motif politik praktis dan ekonomi.

Temuan Inovasinya terlihat, kalau selama ini bicara tentang bank, lazimnya hanya terlihat dalam konteks ekonomi semata. Ternyata dalam kasus Bank Nagari, tidak kalah dominannya adalah terkait dalam masalah politik praktis.

Ketua Tim Peneliti

Syukri Iska,

